

**Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah
Di Provinsi Lampung**

Imam Santoso¹, I Wayan Suparta², Saimul²

¹ Alumni Magister Ilmu Ekonomi (MIE) FEB Unila

² Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Unila

ABSTRACT

This research in purpose to analyze the effect of General Allocation Fund Transfer (DAU) and Revenue Sharing Fund (DBH), Local Pure Income (PAD) and number of civillian to local government expenditure in Lampung Province. To know and analyze how flypaper effect happen to the local government expenditure in Lampung Province. Analyze that flypaper effect happen in the local government with high pure income or local government with low pure income.

This research using a double Natural Log of regression linear method (Ln) with panel data in the 10 (ten) local government in Lampung Province in the 2006-2012 period. The data come from the Regency Expenditure Realization Report on the Fund report of local government that already get into survailance and final audit from BPK RI and submitted to the DJPK Finance Ministry of Indonesian Republic, by <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/> site and Lampung in Figures that published by Central Bureau Of Statistics.

The Research result showing that PAD, DBH, and DAU at the same time affect significantly againts the local government expenditure in Lampung Province; PAD and DAU in partial affect significantly and having a positive relation to the regency expenditure, while DBH statisticaly not affected to the local government expenditure in Lampung Province. Variable Number of Residents (PDK) not going into the regression model because it has a strong linear relation (multicolinearity) with free DAU variable. Coefficient value of DAU much bigger that the PAD and both of them showing a significant results, this thing shows flypaper effect has already happen on the local government expenditure in Lampung Province. Flypaper effect phenomenon in Lampung Province not making a differentiation in every local government that having a much higher fiscal autonomy degree (DOF) in the case of low or high, because statistically the both behavior in the supporting regency expenditure are same depending to the DAU.

Keywords: *Flypaper Effect, General Allocation Fund, Profit Sharing Fund, Regency Pure Income, Number of Residents, Regency Apxenditure.*

Pendahuluan

Sejak diberlakukannya UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan UU No 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Pemda), maka Indonesia memasuki babak baru pengelolaan pemerintahan dari sistem sentralisasi menjadi sistem desentralisasi. (Adi, 2006). Otonomi daerah dilaksanakan dalam rangka menyelenggarakan urusan pemerintah yang lebih efisien, efektif dan bertanggung jawab. Implementasinya diharapkan meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan dan pemeliharaan hubungan yang serasi antara pusat dan daerah, serta antar daerah (Sidik, 2002).

Kebijakan otonomi di satu sisi disambut baik oleh sebagian pemda, namun di sisi lain justru direspon sebaliknya dikarenakan belum siapnya daerah memasuki era ini karena rendahnya kapasitas fiskal daerah (Adi, 2007). Terkait hal ini, pemerintah pusat turut campur tangan melalui pemberian transfer dana perimbangan bagi daerah. Transfer antar pemerintah merupakan fenomena umum yang terjadi di semua negara di dunia terlepas dari sistem pemerintahannya (Fisher dalam Kuncoro, 2007) dan bahkan sudah menjadi ciri yang paling menonjol dari hubungan keuangan antara pusat dan daerah. Tujuan utama pemberian dana transfer adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah pusat dengan pemda, kesenjangan fiskal antar pemda, perbaikan sistem perpajakan, dan koreksi ketidak-efisienan fiskal (Oates, 1999). Daerah diharapkan mampu mengoptimalkan pengelolaan sumber daya sehingga terjadi peningkatan kapasitas fiskal, serta mampu mengurangi ketergantungan kepada pemerintah pusat untuk menjadi lebih mandiri (Adi dan Dewi, 2009).

Dalam perkembangannya tingkat kemandirian daerah justru tidak mengalami perbaikan, bahkan cenderung mengalami penurunan. Tingkat kemandirian daerah dalam era otonomi justru mengalami penurunan (Adi, 2007). Pemda semakin menggantungkan diri pada dana alokasi umum (DAU) daripada mengupayakan peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) (Wibowo, 2007). Alokasi transfer di negara-negara sedang berkembang pada umumnya lebih banyak didasarkan pada aspek belanja tetapi kurang memperhatikan kemampuan pengumpulan pajak lokal (Naganathan dan Sivagnanam, 1999). Akibatnya dari tahun ke tahun pemda selalu menuntut transfer yang lebih besar

lagi dari pusat (Shah, 1994), bukannya mengeksplorasi basis pajak lokal secara lebih optimal (Oates, 1999). Keadaan ini juga ditemui pada kasus pemerintah kota dan kabupaten di Indonesia. Secara nasional data menunjukkan proporsi PAD hanya mampu membiayai belanja pemerintah daerah paling tinggi sebesar 20 persen (DJP, 2012). Pajak daerah dan retribusi daerah seyogyanya mampu membiayai belanja pemda, walaupun sesungguhnya bukan berarti daerah harus mampu membiayai semua belanjanya dari PAD, karena bukan itu yang dimaksud dengan kemandirian keuangan daerah. Hal yang penting dalam konteks otonomi daerah adalah adanya sumber penerimaan yang cukup signifikan bagi daerah untuk memanfaatkannya secara leluasa (Simanjuntak, 2001). Menurut Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI (2014), dana perimbangan memberikan kontribusi terbesar terhadap pendapatan daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung tahun 2013, yaitu sebesar 78,88% atau Rp 10.297,26 milyar, sedangkan lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 15,18% atau Rp 1.981,10 milyar, dan PAD memberikan kontribusi terendah yaitu sebesar 5,94% atau Rp 775,75 milyar.

Beberapa penelitian yang dilakukan di Indonesia menemukan respon pemda berbeda untuk transfer dan pendapatan sendiri seperti pajak. Ketika penerimaan daerah berasal dari transfer, maka stimulasi atas belanja yang ditimbulkannya berbeda dengan stimulasi yang muncul dari PAD terutama pajak daerah. Oates dalam Halim (2002) menyatakan ketika respon belanja daerah lebih besar terhadap transfer daripada pendapatannya sendiri, maka disebut *flypaper effect*. Istilah *flypaper effect* pertama kali dikemukakan oleh Courant, Gramlich, dan Rubinfeld (1979) dalam Kuncoro (2007), untuk mengartikulasikan pemikiran Arthur Okun (1930) yang menyatakan "*money sticks where it hits*". Sejauh ini, belum ada padanan kata "*flypaper effect*" dalam bahasa Indonesia, sehingga kata ini dituliskan sebagaimana adanya tanpa diterjemahkan. Dalam terjemahan bebas menurut Wordpress.com *flypaper effect* adalah suatu fenomena pada suatu kondisi ketika pemda merespon belanja daerahnya lebih banyak berasal dari transfer atau spesifiknya pada transfer tidak bersyarat (*unconditional grants*) daripada PAD-nya tersebut sehingga akan mengakibatkan "pemborosan" dalam belanja daerah. Ditemukannya fenomena *flypaper effect* mengidentifikasi bahwa pemda dalam memenuhi kebutuhan publik senantiasa cenderung lebih merespon atas pengeluaran belanja daerahnya dari transfer, dan lebih

“berhemat” dalam optimalisasi pengeluaran yang berasal dari PAD-nya yang merupakan hasil dari kenaikan pendapatan domestik bruto, sehingga akan menciptakan kecenderungan pemborosan belanja daerah. *Flypaper effect* juga mempengaruhi kecenderungan belanja pemda pada periode selanjutnya, sehingga efek tersebut akan berakibat jangka panjang.

Gamkhar and Oates (1996) dalam Junaidi (2012) meneliti tentang *flypaper effect* pemda di Flemish. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa elastisitas belanja daerah berpengaruh signifikan secara berbeda antara pemda (*municipal*) yang mengalami kenaikan dengan pemda yang mengalami penurunan DAU (*grants*). Ketika terdapat pertumbuhan DAU, pemda membelanjakan belanja daerahnya melebihi tambahan pendapatannya yang berasal dari DAU. Sebaliknya ketika DAU turun, belanja daerah tidak ikut turun, lalu untuk mendanai belanjanya pemda mengkompensasikan penurunan DAU melalui kenaikan pajak. Barnett (1991) *et al* (2012), meneliti dengan menggunakan dua model selama periode 1986-1989 di pemda di luar kota London Inggris. Model penelitian dengan variabel *dummy* daerah yang memperoleh transfer (DAU) besar dengan daerah yang memperoleh transfer kecil, dan tanpa variabel *dummy* (konvensional). Hasil penelitian menyimpulkan baik menggunakan model konvensional maupun model *flypaper effect* bahwa nilai koefisien DAU yang lebih besar dari nilai koefisien *tax*. Dan ketika menggunakan *dummy* variabel, nilai koefisien DAU naik lebih besar dibanding nilai koefisien DAU sebelum menggunakan *dummy* DAU. Hasil kedua model menyimpulkan bahwa terjadi *flypaper effect*.

Realita dari fenomena ini mengakibatkan pemda menjadi kurang termotivasi dalam memaksimalkan potensi PAD-nya. Selain itu DAU dengan sifatnya yang tidak bersyarat mengakibatkan tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun, yang kemudian menyebabkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, sementara pengeluaran untuk memenuhi kebutuhan publik tetap meningkat. Abdul Halim dan Sukriy Abdullah melakukan pengujian adanya *flypaper effect* pada belanja daerah pemerintah kab/kota di pulau Jawa dan Bali pada tahun 2001. Kesimpulan yang diperoleh adalah *flypaper effect* terjadi pada DAU periode $t-1$ terhadap Belanja Daerah periode t . Menanggapi hal ini, Mutiara Maimunah melakukan penelitian yang sama pada pemerintah kab/kota di pulau Sumatera pada tahun 2003 dan 2004. Hasil yang diperoleh konsisten

dengan penelitian Abdul Halim dan Sukriy Abdullah yaitu DAU periode t-1 memiliki pengaruh lebih besar dari pada PAD periode t-1 terhadap Belanja Daerah periode t. Namun ketika diuji pengaruh DAUt dan PADt secara bersama-sama terhadap Belanja Daerah t, hasilnya PAD tidak signifikan dan DAU berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Diah Ayu Kusumadewi (2007) yang melakukan penelitian tentang *flypaper effect* pada DAU dan PAD terhadap belanja daerah kab/kota di Indonesia, menyimpulkan bahwa pemda dalam menetapkan kebijakan belanjanya lebih distimulus oleh jumlah DAU yang diterima tahun berjalan daripada PAD-nya sendiri, sehingga membuktikan adanya *flypaper effect* dalam respon pemda terhadap DAU dan PAD. Hernawan Bayu Purnomo (2011) pada hasil penelitian tentang *flypaper effect* pada pengaruh transfer tidak bersyarat dan PAD terhadap pertumbuhan ekonomi daerah kab/kota di Kalimantan tahun 2007-2010 menyimpulkan bahwa pemerintah kab/kota di Kalimantan cenderung sangat reaktif dan begitu mengharapkan dana dari pemerintah pusat daripada mengoptimalkan potensi sumberdaya yang ada di daerah seluas-luasnya guna meningkatkan PAD-nya.

Penelitian Afrizawati (2012) tentang analisis *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Sumatera Selatan menyimpulkan bahwa pengaruh DAU terhadap belanja daerah lebih besar dibandingkan pengaruh PAD terhadap belanja daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa perilaku pemda yang cenderung memanipulasi pengeluaran pemerintah setinggi mungkin dengan tidak mengupayakan maksimalisasi PAD agar nantinya memperoleh bantuan transfer dari pemerintah pusat, sehingga pemda merasa lebih mudah untuk memaksimalkan belanja daerah daripada menempuh cara untuk memaksimalkan PAD. Junaidi (2012) pada penelitiannya tentang asimetri pada *flypaper effect*, bukti empiris pemanfaatan DAU pada pemda di Indonesia menyimpulkan bahwa terjadi perilaku asimetri pemda dalam penggantian fiskal, ketika DAU meningkat pemda membelanjakan tambahan pendapatan, namun ketika jumlah DAU berkurang maka belanja daerah tidak berkurang dan pemda mengkompensasi pengeluaran tersebut melalui tambahan pungutan pajak. Haryo Kuncoro (2007) yang melakukan penelitian tentang fenomena *flypaper effect* pada kinerja keuangan pemda kab/kota di Indonesia, menyimpulkan bahwa peningkatan alokasi transfer diikuti dengan penggalan PAD lebih tinggi. Simpulan ini mengindikasikan sikap overaktif pemda terhadap arti pentingnya transfer. Bagi

pemerintah pusat, transfer memang diharapkan menjadi pendorong agar pemda secara intensif menggali sumber-sumber penerimaan daerah sesuai kewenangannya. Namun penggalan PAD yang hanya didasarkan pada faktor inkremental akan berakibat negatif pada perekonomian daerah.

Berdasarkan hasil-hasil penelitian tersebut bahwa masih terdapat perbedaan kesimpulan antar para peneliti, hal ini disebabkan tiap-tiap daerah memiliki karakteristik tersendiri baik dari sisi geografis, kehidupan masyarakat maupun kondisi ekonominya. Untuk melengkapi hasil penelitian terdahulu, penulis tertarik melakukan penelitian pada kab/kota di Provinsi Lampung mengenai pengaruh PAD, dana transfer (DAU dan DBH), dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah.

Perumusan Masalah

Rumusan masalah yang diajukan adalah:

1. Bagaimanakah dana transfer DAU dan DBH, PAD dan jumlah penduduk berpengaruh terhadap belanja pemerintah kab/kota di Provinsi Lampung?
2. Apakah *flypaper effect* terjadi pada pengelolaan keuangan daerah kab/kota di Provinsi Lampung dalam kurun waktu 2006 – 2012?
3. Apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD tinggi atau daerah dengan PAD rendah.

Tujuan Penelitian

Tujuan diadakannya penelitian ini adalah:

1. Menganalisis pengaruh dana transfer DAU dan DBH, PAD dan jumlah penduduk terhadap belanja pemerintah kab/kota di Provinsi Lampung.
2. Mengetahui dan menganalisis apakah *flypaper effect* terjadi pada belanja pemerintah kab/kota di Provinsi Lampung.
3. Menganalisis apakah *flypaper effect* terjadi pada daerah dengan PAD tinggi atau daerah dengan PAD rendah.

Tinjauan Pustaka

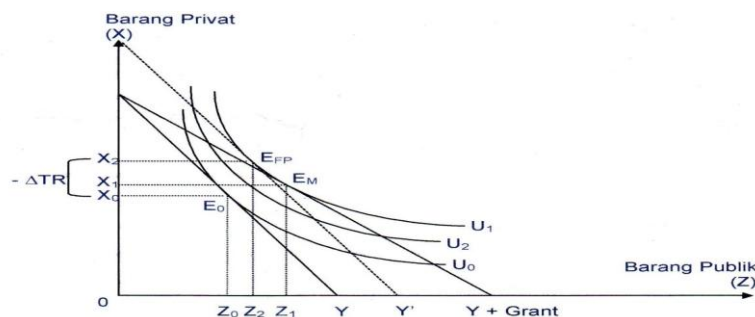
Flypaper Effect

Wilde (1968) dalam Kuncoro (2007) mempelopori analisis transfer ke dalam format kendala anggaran dan kurva indiferensi. Pengaruh transfer pada kinerja fiskal pemerintah daerah dapat dijelaskan melalui teori perilaku konsumen. Transfer ini bertujuan, mewujudkan terjadinya peningkatan pembangunan daerah yang tercermin dari meningkatnya kesejahteraan masyarakat melalui

peningkatan pendapatannya. Analisis Wilde dapat diringkas ke dalam Gambar 2.1 yang menghubungkan pengeluaran konsumsi barang privat dan barang publik. Seperti halnya seorang individu, masyarakat mempunyai preferensi sebagaimana ditunjukkan oleh kurva indifferens (U_0 , U_1 , U_2) dengan kendala anggaran (garis Y dan $Y+G$ (*grants*)). Masyarakat dianggap berperilaku rasional yang memaksimalkan utilitas dengan kendala pendapatannya. Transfer bersyarat (*conditional grants*) berpengaruh pada konsumsi barang privat melalui efek harga. Bantuan bersyarat, misalnya transfer penyeimbang tidak terbatas (*open-ended matching grants*), akan menurunkan harga barang publik. Dalam konteks ini, pemerintah memberikan subsidi untuk setiap unit barang publik.

Sebagaimana ditunjukkan pada Gambar 2.1, bantuan bersyarat berasosiasi dengan pergeseran garis anggaran berputar ke kanan sehingga garis anggaran yang baru lebih datar. Akibatnya, konsumsi barang publik mengalami peningkatan dari semula Z_0 menjadi sebesar Z_1 . Besarnya pengaruh transfer bersyarat pada konsumsi barang privat tergantung pada sensitivitas silangnya (*elastisitasnya*). Harga barang publik yang lebih rendah akan meningkatkan konsumsi barang privat apabila pemerintah daerah telah menurunkan tarif pajak. Sebelum ada penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat adalah sebesar X_1 , setelah penurunan tarif pajak, konsumsi barang privat meningkat menjadi sebesar X_2 . Dengan demikian, kenaikan transfer sebagian berakibat pada kenaikan konsumsi barang publik dan sebagian lagi pada konsumsi barang privat secara tidak langsung melalui penurunan tarif pajak.

Gambar 2.1 Pengaruh Transfer Bersyarat

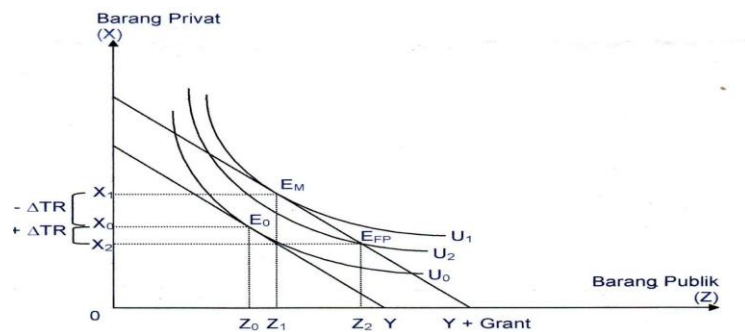


Sumber : Haryo Kuncoro, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. 2007

Dalam kasus bantuan tak bersyarat (*unconditional grants*), transfer sebesar G mendorong kenaikan garis anggaran dari Y ke $Y+G$ pada Gambar 2.2. Mengikuti Bradford dan Oates (1971), Borchering dan Deacon (1972), dan Bergstrom dan Goodman (1973), barang publik diasumsikan sebagai barang normal. Dengan

asumsi tersebut maka transfer yang bersifat umum (*lump-sum*) akan menggeser keseimbangan konsumen dari titik E_0 ke E_m . Pada posisi keseimbangan yang baru tersebut, konsumsi barang publik dan barang privat masing-masing menjadi sebesar Z_1 dan X_1 .

Gambar 2.2. Pengaruh Transfer Tak Bersyarat



Sumber : Haryo Kuncoro, Simposium Nasional Akuntansi X Makassar. 2007

Dengan sifatnya yang tidak bersyarat, maka tekanan fiskal pada basis pajak lokal akan menurun yang kemudian mengakibatkan penerimaan pajak juga mengalami penurunan, yaitu sebesar $-\Delta TR$, sementara pengeluaran konsumsi barang publik tetap meningkat. Ini berarti transfer akan mengurangi beban pajak masyarakat, sehingga pemerintah daerah tidak perlu menaikkan pajak guna membiayai penyediaan barang publik. Dengan demikian, analisis ini menegaskan bahwa pengeluaran pemerintah daerah dalam penyediaan barang publik tidak akan berbeda sebagai akibat dari penurunan pajak daerah atau kenaikan transfer.

Dalam hal bantuan tak bersyarat ini, para peneliti menemukan keseimbangan masyarakat setelah menerima transfer berada pada titik E_{fp} (bukannya pada E_m) yang menunjukkan kenaikan penerimaan pajak daerah ($+\Delta TR$) dan juga kenaikan konsumsi barang publik (dari Z_1 menjadi Z_2). Ini berarti transfer meningkatkan pengeluaran konsumsi barang publik, tetapi tidak menjadi substitusi bagi pajak daerah. Fenomena tersebut dalam banyak literatur disebut *flypaper effect*. Fenomena *flypaper effect* membawa implikasi lebih luas bahwa transfer akan meningkatkan belanja pemerintah daerah yang lebih besar daripada penerimaan transfer itu sendiri (Turnbull, 1998). Fenomena *flypaper effect* dapat terjadi dalam dua versi (Gorodnichenko, 2001). Pertama, merujuk pada peningkatan pajak daerah dan anggaran pemerintah yang berlebihan. Kedua, mengarah pada elastisitas pengeluaran terhadap transfer yang lebih

tinggi daripada elastisitas pengeluaran terhadap penerimaan pajak daerah. Dalam ilmu ekonomi, untuk mengukur kepekaan (*sensitive*) permintaan terhadap perubahan-perubahan harga dan terhadap perubahan-perubahan pendapatan digunakan konsepsi elastisitas, yaitu suatu ukuran perbandingan dalam mana perubahan-perubahan baik dalam pembilang maupun penyebut dinyatakan dalam bentuk perbandingan atau persentase (Hirshleifer, 1985). Sejalan dengan konsep elastisitas tersebut, maka untuk mengukur respon pengeluaran transfer pemerintah pusat dalam bentuk DAU dan DBH, serta PAD relatif terhadap belanja daerah kabupaten kota di Provinsi Lampung digunakan konsep elastisitas silang dana transfer dan PAD terhadap belanja daerah.

Model Regresi Data Panel

Ketika suatu observasi menggunakan gabungan data *cross section* dan *time series*, maka gabungan data ini disebut data panel (*panelpooled data*). Regresi dengan menggunakan data panel disebut regresi data panel. Beberapa keuntungan menggunakan data panel antara lain (1) data panel mampu menyediakan data yang lebih banyak sehingga akan menghasilkan *degree of freedom* yang lebih besar, (2) dapat mengatasi masalah yang timbul ketika ada masalah penghilangan variabel, (Widarjono, 2013). Regresi dengan menggunakan data panel akan menghasilkan intersep dan slope koefisien yang berbeda setiap pengamatan *cross section* dan setiap periode waktu. Oleh karena itu dalam mengestimasi suatu persamaan regresi data panel, akan sangat tergantung dari asumsi yang dibuat tentang intersep, koefisien slope dan variabel gangguannya. Beberapa kemungkinan yang muncul, (1) diasumsikan intersep dan slope adalah tetap sepanjang waktu dan individu, dan perbedaan intersep dan slope dijelaskan oleh variabel gangguan, (2) diasumsikan slope adalah tetap tetapi intersep berbeda antar individu, (3) diasumsikan slope tetap tetapi intersep berbeda baik antar waktu maupun antar individu, (4) diasumsikan intersep dan slope berbeda antar individu, dan (5) diasumsikan intersep dan slope berbeda antar waktu dan antar individu. Namun demikian ada tiga metode yang biasa digunakan untuk mengestimasi model regresi dengan data panel, yaitu pendekatan *Common Effect*, *Fixed Effect*, dan *Random Effect*.

Tehnik yang paling sederhana untuk mengestimasi data panel adalah hanya dengan mengkombinasikan data *time series* dan *cross section*, yaitu dengan hanya menggabungkan data tersebut tanpa melihat perbedaan antar waktu dan

individu, maka bisa digunakan metode *Ordinary Least Square* (OLS) untuk mengestimasi data panel. Dalam pendekatan ini tidak memperhatikan dimensi individu maupun waktu, diasumsikan bahwa perilaku data antar perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. (Widarjono, 2013). Selanjutnya, salah satu cara untuk mengetahui adanya perbedaan intersep antar individu adalah dengan mengasumsikan bahwa intersep berbeda sedangkan slopenya tetap sama antar individu. Model yang mengasumsikan adanya perbedaan intersep di dalam persamaan regresinya dikenal dengan model regresi *Fixed Effect*. Teknik model *Fixed Effect* adalah teknik mengestimasi data panel dengan menggunakan dummy variabel untuk menangkap adanya perbedaan intersep. Pengertian *Fixed Effect* didasarkan adanya perbedaan intersep antara individu namun intersepnya sama antar waktu (*time invariant*). Disamping itu model ini juga mengasumsikan bahwa koefisien regresi (slope) tetap antar individu dan antar waktu. Karena menggunakan metode teknik variabel dummy untuk menjelaskan perbedaan intersep tersebut, maka model ini seringkali disebut dengan teknik *Least Squares Dummy Variables* (LSDV).

Dimasukkannya variabel dummy di dalam model *fixed effect* bertujuan untuk mewakili ketidaktahuan tentang model yang sebenarnya. Namun ini juga membawa konsekuensi berkurangnya derajat kebebasan (*degree of freedom*) yang pada akhirnya mengurangi efisiensi parameter. Masalah ini bisa diatasi dengan menggunakan variabel gangguan (*error terms*), dikenal sebagai metode *random effect*. Metode *random effect* berasal dari pengertian bahwa gangguan *vit* terdiri dari dua komponen yaitu variabel gangguan secara menyeluruh *vit* yaitu kombinasi *time series* dan *cross section* dan variabel gangguan secara individu *vit*. Dalam hal ini variabel gangguan μ_{it} adalah berbeda-beda antar individu tetapi tetap antar waktu. Karena itu model *random effect* juga sering disebut dengan *Error Component Model* (ECM). Karena adanya korelasi antara variabel gangguan di dalam persamaan, maka teknik OLS tidak bisa digunakan untuk mendapatkan estimator yang efisien. Metode yang tepat digunakan untuk mengestimasi model *random effect* adalah *Generalized Least Squares* (GLS).

Pemilihan Teknik Estimasi Regresi Data Panel

Untuk menentukan teknik yang paling tepat guna mengestimasi regresi data panel, ada tiga uji yang digunakan, yaitu (1) Uji statistik F digunakan untuk memilih antara metode OLS tanpa dummy atau *fixed effect*, (2) Uji Lagrange

Multiplier (LM) digunakan untuk memilih antara OLS tanpa variabel dummy atau *random effect*, dan (3) untuk memilih antara *fixed effect* atau *random effect* digunakan uji yang dikemukakan oleh Hausman.

(1) Uji Signifikansi *Fixed Effect*, keputusan apakah sebaiknya menambah variabel dummy untuk mengetahui bahwa intersep berbeda antar individu dengan metode *fixed effect* dapat diuji dengan uji F statistik. Uji signifikansi *Fixed Effect* (Uji F) merupakan uji perbedaan dua regresi sebagaimana uji Chow, yaitu untuk mengetahui apakah teknik regresi data panel dengan *fixed effect* lebih baik dari model regresi data panel tanpa variabel *dummy* atau OLS, (2) Uji Signifikansi *Random Effect*, untuk mengetahui apakah model *random effect* lebih baik dari metode OLS digunakan uji Lagrange Multiplier. Uji signifikansi *random effect* dikembangkan oleh Breusch-Pagan (Widarjono, 2013). Uji signifikansi *random effect* didasarkan pada nilai residual dari metode OLS. Uji LM didasarkan pada distribusi *chi-squares* dengan *degree of freedom* sebesar jumlah variabel independen. Jika LM statistik lebih besar nilai kritis statistik *chi-squares* maka hipotesis nol ditolak. Artinya, estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah metode *random effect* dari metode OLS. Sebaliknya jika nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik *chi-squares* sebagai nilai kritis, maka hipotesis nol diterima. Estimasi *random effect* dengan demikian tidak bisa digunakan untuk regresi data panel, tetapi digunakan metode OLS, (3) Uji Signifikansi *Fixed Effect* atau *Random Effect*, untuk memilih apakah menggunakan model *fixed effect* atau *random effect* yang paling baik digunakan dilakukan Uji Hausman. Uji ini didasarkan pada ide bahwa LSDV di dalam metode *fixed effect* dan *Generalized Least Squares* (GLS) adalah efisien, sedangkan metode OLS tidak efisien. Di lain pihak alternatifnya metode OLS efisien dan GLS tidak efisien. Karena itu uji hipotesis nolnya adalah hasil estimasi keduanya tidak berbeda, sehingga uji Hausman bisa dilakukan berdasarkan perbedaan estimasi tersebut. Statistik uji Hausman ini mengikuti distribusi statistik *Chi Square* dengan *degree of freedom* sebanyak k , di mana k adalah jumlah variabel independen. Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka model yang tepat adalah model *fixed effect*, sedangkan sebaliknya bila nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya, maka model yang tepat adalah model *random effect*.

Metodologi Penelitian

Data Penelitian dan Sumber Data

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data panel, yaitu gabungan data time series tahun 2006-2012, dan data cross section yang terdiri atas 15 kab/kota di provinsi Lampung. Data belanja daerah, PAD, DBH dan DAU yang digunakan adalah data realisasi APBD dari Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) seluruh kab/kota di provinsi Lampung yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia dan telah disampaikan ke Biro Keuangan Provinsi Lampung, Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kemenkeu RI dan Direktorat Jenderal Keuangan Daerah (DJKD) Kemendagri RI. Data jumlah penduduk dan data pendukung lain diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Lampung, Bank Indonesia (BI) Perwakilan Lampung, serta institusi dan instansi lainnya. Untuk memenuhi tersedianya data dengan waktu pengamatan yang relatif lama, maka terdapat beberapa pertimbangan yang digunakan untuk menentukan jumlah kab/kota yang akan diamati perilaku belanja daerahnya, yaitu: (1) pemerintahan kab/kota di Provinsi Lampung yang telah menyerahkan laporan realisasi APBD-nya dalam bentuk LKPD yang telah diaudit oleh BPK RI dan diserahkan ke Biro Keuangan Provinsi Lampung, DJPK Kemenkeu RI (www.djpk.depkeu.go.id) dan DJKD Kemendagri RI. (2) pemerintahan kab/kota yang memiliki informasi keuangan yang dibutuhkan sebagai variabel penelitian. Informasi tersebut meliputi belanja daerah, PAD, DBH dan DAU secara berturut-turut tahun 2006-2012, (3) dari total 15 kab kota, 5 kabupaten merupakan daerah otonomi baru yang usianya dibawah 5 tahun. Peneliti ingin memperoleh data dengan rentang waktu relatif lama sehingga data penelitian akan semakin bervariasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut maka dari 15 kab/kota terdapat 8 kabupaten dan 2 kota yang memenuhi kriteria menjadi sampel penelitian ini.

Definisi Operasional Variabel

Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis, maka dikemukakan definisi variabel yang digunakan sebagai berikut :

Tabel 3.1. Variabel Penelitian, Ukuran, dan Sumber Data

NAMA VARIABEL	SIMBOL	UKURAN	SUMBER DATA
Belanja Daerah	BD	Juta rupiah	Laporan Realisasi Belanja Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK RI dan diserahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, melalui situs http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/
Pendapatan Asli Daerah	PAD	Juta rupiah	Laporan Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK RI dan diserahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, melalui situs http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/
Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak (SDA)	DBH	Juta rupiah	Laporan Realisasi Penerimaan Dana Bagi Hasil Daerah pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK RI dan diserahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, melalui situs http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/
Dana alokasi umum	DAU	Juta Rupiah	Laporan Realisasi Penerimaan DAU pada Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah diaudit BPK RI dan diserahkan kepada Dirjen Perimbangan Keuangan Kemenkeu RI, melalui situs http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/
Jumlah Penduduk	PDK	Orang	Lampung Dalam Angka yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung

Model Analisis

Untuk mendeteksi terjadinya *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Provinsi Lampung, menggunakan model analisis yang dikembangkan Pommerehne and Schneider (1979), Heyndels and Smolders (1994), Turnbull and Djoundourian (1994), Becker (1996), Dollery and Worthington (1999), Melo (2002) Sagbas and Saruc (2004), dalam Agus Widarjono (2005), yaitu fungsi pengeluaran untuk barang-barang yang disediakan untuk publik oleh pemerintah pusat atau pemda dapat dinyatakan sebagai berikut :

$$E = f(Y, Tr, Pop) \quad (1)$$

Keterangan :

- E = Total pengeluaran pemda
- Y = Pendapatan Asli Daerah
- Tr = Transfer antar pemerintah
- Pop = Jumlah penduduk
- e = random disturbance terms

Mengikuti model di atas maka belanja daerah (BD) dipengaruhi oleh PAD, penerimaan transfer dari DBH, penerimaan transfer dari DAU dan jumlah penduduk (PDK), sehingga;

$$BD_{it} = f(PAD_{it}, DBH_{it}, DAU_{it}, PDK_{it}) \quad (2)$$

Keterangan :

- BD_{it} = belanja daerah kab/kota pada tahun t
- PAD_{it} = pendapatan asli daerah kab/kota pada tahun t
- DBH_{it} = dana bagi hasil yang diterima kab/kota dari pemerintah pada tahun t
- DAU_{it} = dana alokasi umum yang diterima kab/kota dari pemerintah pada tahun t
- PDK_{it} = jumlah penduduk kab/kota pada tahun t
- i = cross section kab/kota sampel
- t = time series atas rentang tahun pengamatan
- u = error term,

Studi ini dilakukan dengan menggunakan model data panel untuk menyelidiki terjadinya *flypaper effect* pada belanja pemda. Jenis spesifikasi model linier atau log natural akan menentukan *flypaper effect* untuk belanja pemerintah daerah (Bailey dan Connolly, 1998). Untuk mengatasi masalah adanya data yang ekstrim, maka penelitian ini menggunakan Log Natural (Ln) dengan spesifikasi model dapat ditulis sebagai berikut:

$$\text{LnBDit} = b_0 + b_1 \text{LnPADit} + b_2 \text{LnDBHit} + b_3 \text{LnDAUit} + b_4 \text{LnPDKit} \\ + b_5 \text{Dit} + \text{uit}$$

Keterangan ;

BDit	=	belanja daerah kab/kota pada tahun t
PADit	=	pendapatan asli daerah kab/kota pada tahun t
DBHit	=	dana bagi hasil yang diterima kab/kota dari pemerintah pusat pada tahun t
DAUit	=	dana alokasi umum yang diterima kab/kota dari pemerintah pusat pada tahun t
PDKit	=	jumlah penduduk kab/kota pada tahun t
Dit	=	variabel <i>dummy</i> untuk mengelompokkan daerah kab/kota berdasarkan derajat otonomi fiskal (DOF), yaitu 1 untuk daerah DOF tinggi dan 0 untuk daerah DOF rendah. Rasio DOF dapat dihitung dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah yang bersangkutan (Balitbang Kemendagri kerjasama dengan Fisipol UGM, 1999).
i	=	cross section kab/kota sampel
t	=	time series atas rentang tahun pengamatan
u	=	error term,
b ₀	=	konstanta,
b ₁ , b ₂ , b ₃ , b ₄ , dan b ₅	=	koefisien regresi dari variabel bebas PAD, DBH, DAU, PDK, dan variabel <i>Dummy</i> .

Untuk menguji hipotesa pertama, dilakukan uji F yaitu dengan membandingkan nilai F hitung yang dihasilkan dari model regresi tersebut dengan F tabel (probabilitas) pada derajat signifikansi (α) yaitu 0,05. Kriteria yang digunakan untuk menarik kesimpulan hipotesa adalah jika F hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka Ho ditolak, bahwa variabel DAU, DBH, PAD dan Jumlah Penduduk secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pengujian dengan uji t dilakukan untuk melihat pengaruh masing-masing variabel bebas PAD, DBH, DAU dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah, yaitu dengan membandingkan nilai t hitung yang dihasilkan oleh masing-masing variabel bebas dalam persamaan regresi dengan t tabel pada derajat signifikansi (α) yaitu 0,05. Kriteria untuk menarik kesimpulan hipotesa yaitu jika nilai t hitung $< \alpha$ ($\alpha = 0,05$) maka Ho ditolak. Deteksi terhadap *flypaper effect* dapat diperoleh melalui pertama, nilai koefisien transfer (DBH dan DAU) lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, atau kedua, pendapatan daerah (PAD) tidak signifikan (Khairani, 2008; Maimunah, 2006, serta Sagbas dan Saruc, 2004).

Untuk menguji hipotesis ketiga, maka dengan menggunakan variabel *Dummy* daerah kab/kota diklasifikasikan menjadi kategori daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah. Dasar dari pengklasifikasian ini adalah nilai persentase dari derajat otonomi fiskal (DOF) masing-masing daerah. Rasio DOF ini dapat dihitung dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah yang bersangkutan. Formula yang digunakan untuk menghitung rasio DOF ini berdasarkan kriteria yang dikembangkan oleh Tim Litbang Kemendagri RI kerjasama dengan Fisipol UGM (1991), yaitu :

$$DOF = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Total Pendapatan}}$$

Dummy daerah dengan nilai rasio DOF diatas rata-rata dikategorikan sebagai daerah dengan PAD tinggi = 1, dan *dummy* daerah dengan nilai rasio DOF dibawah rata-rata dikategorikan sebagai daerah dengan PAD rendah = 0.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Analisis Ekonometrika

Pemilihan Metode Pengujian Data Panel

Hasil perhitungan regresi data panel dengan menggunakan pendekatan *Common Effect*, pendekatan *Fixed Effect*, dan pendekatan *Random Effect* masing-masing sebagai berikut.

Tabel 4.1. Hasil analisis regresi penduga model Belanja Daerah dengan Metode Kuadrat Terkecil (*Pooled Least Square* atau *Common Effect*), Metode Efek Tetap (*Fixed Effect*,) dan Metode Efek Acak (*Random Effect*).

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
I. Metode Common Effect					
PAD	0,113407	0,031467	3,603965	0,0006	Signifikan
DBH	0,064925	0,038703	1,677517	0,0982	Tidak Signifikan
DAU	1,042409	0,051622	20,19311	0,0000	Signifikan
PDK	-0,149425	0,036489	-4,095100	0,0001	Signifikan
Dummy	-0,061303	0,042748	-1,434079	0,1563	Tidak Signifikan
R-squared	0,924878				
Adjusted R-squared	0,920255				
II. Metode Fixed Effect					
Intercept	0,852383	1,251119	0,681296	0,4985	Tidak Signifikan
PAD	0,199849	0,040413	4,945212	0,0000	Signifikan
DBH	-0,071503	0,078342	-0,912710	0,3654	Tidak Signifikan
DAU	0,977800	0,091087	10,73482	0,0000	Signifikan
PDK	-0,102527	0,093791	-1,097813	0,2771	Tidak Signifikan
Dummy	-0,062215	0,048771	-1,275644	0,2074	Tidak Signifikan
R-squared	0,949255	F-statistic		73,48882	
Adjusted R-squared	0,936008	Prob (F-statistic)		0,000000	Signifikan

III. Metode Random Effect					
Intercept	1,228037	0,599751	2,047580	0,0447	Tidak Signifikan
PAD	0,154362	0,034504	4,473684	0,0000	Signifikan
DBH	0,019138	0,041181	0,464725	0,6437	Tidak Signifikan
DAU	0,916011	0,077059	11,88716	0,0000	Signifikan
PDK	-0,109906	0,037887	-2,900912	0,0051	Signifikan
Dummy	-0,112757	0,045720	-2,466273	0,0163	Tidak Signifikan
R-squared	0,928746	F-statistic		166,8392	
Adjusted R-squared	0,923179	Prob (F-statistic)		0,000000	Signifikan

Sumber : Lampiran 7.1, Lampiran 7.2 dan Lampiran 7.4

Uji Chow

Uji Chow menghasilkan nilai probabilitas F-hitung lebih kecil dari $\alpha=0,05$ memutuskan bahwa metode *Fixed Effect Model* signifikan dalam menguji data panel, dan sebaliknya.

Tabel 4.2. Hasil Uji Chow

Uji Chow	
Residual sum of Square dari model <i>Common Effect</i>	0,677636
Residual sum of Squares dari model <i>Fixed Effect</i>	0,457746
Uji Chow / F-hitung	2,93
F-tabel df (9,55)	2,06
Keputusan	F-hitung > F-tabel 2,93 > 2,06 <i>Fixed Effect Model</i>

Sumber : Lampiran 7.1 dan 7.2

$$CHOW = \frac{(0,677636 - 0,457746) / (10 - 1)}{0,457746 / (70 - 10 - 5)} = 2,935628$$

Berdasarkan tabel 4.2 hasil uji Chow menunjukkan bahwa F-hitung lebih besar dari F-tabel atau $2,93 > 2,06$ maka H_0 ditolak dan H_1 diterima, sehingga model yang digunakan adalah model *Fixed Effect*. Oleh karena itu dilakukan uji lebih lanjut untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Uji Hausman

Langkah selanjutnya untuk menentukan model mana yang paling tepat digunakan antara *Fixed Effect* dengan *Random Effect* untuk mengestimasi regresi data panel adalah dilakukan Uji Hausman. Berdasarkan tabel 4.3. *Chi-Square* (χ^2) tabel yang diperoleh dengan 5 variabel bebas dan nilai signifikan pada $\alpha=0,05$, didapatkan nilai *Chi-Square* (χ^2) tabel sebesar 11,07 dan nilai *Chi-Square* (χ^2) hitung sebesar 20,931269, sehingga disimpulkan nilai *Chi-Square* (χ^2) statistik lebih besar daripada *Chi-Square* (χ^2) tabel ($20,931269 > 11,07$), maka H_0 ditolak dan model yang tepat adalah model *Fixed Effect*.

Tabel 4.3. Hasil uji Hausman

Uji Hausman	
Chi Square Statistic	20.931269
Chi Square tabel d.f (5) $\alpha=0,05$	11,07
Keputusan	<i>Chi-Square (χ^2) Hitung > Chi Square (χ^2) tabel</i> 20,931269 > 11,07 <i>Fixed Effect Model</i>

Sumber : Lampiran 7.5

Hasil Uji Chow dan Uji Hausman menyimpulkan bahwa *Fixed Effect Model* merupakan tehnik analisis yang paling sesuai untuk digunakan dalam analisis data panel ini. Dengan demikian Uji LM untuk memilih antara *Common Effect* dengan *Random Effect Model* menjadi tidak diperlukan lagi.

Hasil Estimasi Regresi dan Uji Hipotesis

Hasil Estimasi

Hasil estimasi persamaan regresi pengaruh PAD, DBH, DAU, dan Jumlah Penduduk (PDK) terhadap Belanja Daerah (BD) kab/kota di Provinsi Lampung sebagai berikut.

Tabel 4.4. Hasil analisis regresi penduga model Belanja Daerah

Variable	Coefficient	Std.Error	t-Statistic	Prob.	Kesimpulan
Intercept	0,852383	1,251119	0,681296	0,4985	Tidak Signifikan
PAD	0,199849	0,040413	4,945212	0,0000	Signifikan
DBH	-0,071503	0,078342	-0,912710	0,3654	Tidak Signifikan
DAU	0,977800	0,091087	10,73482	0,0000	Signifikan
PDK	-0,102527	0,093791	-1,097813	0,2771	Tidak Signifikan
Dummy	-0,062215	0,048771	-1,275644	0,2074	Tidak Signifikan
R-squared	0,949255	F-statistic	73,48882		Signifikan
Adjusted R-squared	0,936008	Prob (F-statistic)	0,000000		

Sumber : Lampiran 7.2

Dari tabel 4.4 diketahui model belanja daerah kab/kota di Provinsi Lampung adalah :

$$\begin{aligned} \text{LnBD} &= 0,8524 + 0,1998 \text{ LnPAD} - 0,0715 \text{ LnDBH} + 0,9778 \text{ LnDAU} \\ \text{t-stat} &= (0,6813) \quad (4,9452) \quad (-0,9127) \quad (10,7348) \\ &\quad - 0,1025 \text{ LnPDK} - 0,0622 \text{ D} \\ &\quad (-1,0978) \quad (-1,2756) \end{aligned}$$

Diduga terdapat masalah korelasi antar variabel bebas di dalam model; model yang mempunyai standard error yang besar dan nilai ststistik t yang rendah, dengan demikian merupakan indikasi awal adanya masalah multikolinearitas dalam model. (Widarjono, 2013). Menurut Greene (2002), gejala multikolinearitas dalam model ditandai dengan koefisien mungkin memiliki kesalahan standar (*standar error*) yang sangat tinggi dan tingkat signifikansi yang

rendah, meskipun mereka secara bersama-sama sangat signifikan dan R^2 dalam regresi cukup tinggi. Kemudian koefisien akan memiliki tanda yang salah atau besarnya tidak masuk akal. Masalah korelasi antar variabel ini menyebabkan model menjadi tidak efisien. Untuk mendeteksi adanya masalah korelasi antar variabel bebas maka dilakukan uji hubungan antar variabel bebas.

Tabel 4.5. Nilai Koefisien Korelasi Antar Variabel Bebas

	LnPAD	LnDBH	LnDAU	LnPDK	Dummy
LnPAD	1	0,31888	0,47107	0,27311	0,62066
LnDBH	0,31888	1	0,53684	0,57919	-0,18897
LnDAU	0,47107	0,53684	1	0,84732	-0,21004
LnPDK	0,27311	0,57919	0,84732	1	-0,28355
Dummy	0,62066	-0,18897	-0,21004	-0,28355	1

Sumber : Lampiran 8.1 sampai dengan 8.10

Dari tabel 4.5 di atas, terjadi masalah multikolinearitas pada model penelitian ditandai dengan nilai koefisien korelasi antara variabel bebas DAU dan PDK sebesar 0,84732 yang menandakan kuatnya hubungan antara variabel DAU dengan PDK, variabel bebas lainnya menunjukkan nilai koefisien korelasi yang rendah. Di dalam model memang variabel Jumlah Penduduk (PDK) tidak signifikan mempengaruhi Belanja Daerah (BD). Hubungan korelasi antara variabel bebas DAU dengan PDK disebabkan oleh karena variabel PDK menjadi salah satu variabel penghitung alokasi dana DAU kepada daerah. Selanjutnya untuk melihat apakah terjadi autokorelasi pada model, dilakukan uji Durbin-Watson (DW Test). Autokorelasi dalam konsep regresi berarti komponen *error* atau residual berkorelasi berdasarkan urutan waktu (pada data *time series*) atau urutan ruang (pada data *cross section*). Untuk mendapatkan hasil yang baik, seharusnya model terbebas dari persoalan autokorelasi. Berdasarkan hasil analisis data, diperoleh nilai DW sebesar 1,800, dan berdasarkan tabel DW dengan $n = 70$ dan $k = 5$ maka diperoleh nilai $dl = 1,464$ dan $du = 1,768$. Dengan demikian nilai DW yang dihasilkan terletak pada kaidah keputusan untuk menolak adanya autokorelasi.

Untuk melihat apakah terjadi heteroskedastisitas pada model, dilakukan Uji White (*White Test*). Heteroskedastisitas merupakan kondisi di mana varian (σ^2) dari faktor pengganggu atau *error term* adalah tidak sama untuk semua observasi atau pengamatan atas variabel bebas (X_i). Berdasarkan hasil analisis residual, diperoleh *Chi Square* dari *White Test* dengan *No Cross Terms* 8.298157

probabilitas 0,1406. Sedangkan *White Test* dengan *Cross Terms* menghasilkan *Chi Square* 11.10835 probabilitas 0.9201. Disimpulkan nilai probabilitas *White Test No Cross Terms* dan *Cross Terms* menghasilkan masing-masing : *No Cross Terms* pada Alpha 0,05 ($0,1406 > 0,05$) dan *Cross Terms* pada Alpha 0,05 ($0.9201 > 0,05$) , sehingga tidak dapat menolak H_0 dan menyimpulkan tidak terdapat heteroskedastisitas dalam model.

Tabel 4.6. Hasil Pengujian Heteroskedastisitas Melalui *White Test – No Cross Terms* dan *White Test – Cross Terms*

Heteroskedasticity Test: <i>White No Cross Term</i>			
F-statistic	1.721446	Prob. F(5,64)	0.1424
Obs*R-squared	8.298157	Prob. Chi-Square(5)	0.1406
Scaled explained SS	7.123222	Prob. Chi-Square(5)	0.2116
Heteroskedasticity Test: <i>White Cross Terms</i>			
F-statistic	0.496378	Prob. F(19,50)	0.9519
Obs*R-squared	11.10835	Prob. Chi-Square(19)	0.9201
Scaled explained SS	9.535523	Prob. Chi-Square(19)	0.9635

Sumber : Lampiran 9.1 dan Lampiran 9.2

Setelah dilakukan uji pemilihan model secara formal dengan menggunakan uji Chow dan uji Hausman, maka didapatkan model yang sesuai adalah model *fixed effect*. Berdasarkan uji DW tidak terdapat autokorelasi, sedangkan berdasarkan uji White baik dengan *Cross Terms* maupun dengan *No Cross Terms* tidak terdapat heteroskedastisitas, akan tetapi berdasarkan uji hubungan antar variabel bebas ternyata terdeteksi terjadinya masalah multikolinearitas dalam model. Untuk mengatasi masalah multikolinearitas tersebut maka salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menghilangkan variabel bebas yang mempunyai hubungan linier kuat (Gujarati,2002). Dalam uji korelasi pada tabel 4.5 di atas, maka variabel yang memiliki hubungan linier yang kuat adalah variabel bebas DAU dengan PDK, sehingga dapat dihilangkan variabel Jumlah Penduduk (PDK). Adapun hasil analisis regresi setelah dilakukan koreksi sebagaimana tertera pada Tabel 4.7.

Tabel 4.7 Hasil Analisis Regresi Penduga Model Belanja Daerah Setelah Dilakukan Koreksi

Variabel	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Probability	Kesimpulan
Intercept	-0.004300	0.979720	-0.004389	0.9965	Tidak Signifikan
PAD	0.2028259	0.039753	5.238866	0.0000	Signifikan
DBH	-0.112408	0.069040	-1.628156	0.1091	Tidak Signifikan
DAU	0.967261	0.090745	10.65908	0.0000	Signifikan
Dummy	-0.064949	0.048797	-1.331024	0.1886	Tidak Signifikan

Sumber : Lampiran 10

Sebelum dilakukan koreksi, model belanja daerah kab/kota di Provinsi Lampung yang masih memasukkan variabel bebas jumlah penduduk (PDK) adalah :

$$\begin{aligned} \text{LnBD} &= 0,8524 + 0,1998 \text{ LnPAD} - 0,0715 \text{ LnDBH} + 0,9778 \text{ LnDAU} \\ \text{t-stat} &= (0,6813) \quad (4,9452) \quad (-0,9127) \quad (10,7348) \\ &\quad - 0,1025 \text{ LnPDK} - 0,0622 \text{ D} \quad (-1,0978) \quad (-1,2756) \end{aligned}$$

Setelah dilakukan koreksi (variabel bebas PDK tidak dimasukkan ke dalam model) sebagaimana Tabel 4.7 di atas, maka diperoleh model Belanja Daerah Kab/Kota di Provinsi Lampung dengan *fixed effect model* adalah :

$$\begin{aligned} \text{LnBD} &= - 0,0043 + 0,2028 \text{ LnPAD} - 0,1124 \text{ LnDBH} + 0,9673 \text{ LnDAU} - 0,0649 \text{ D} \\ \text{t-stat} &= - (0,0044) \quad (5,2389) \quad (-1,6282) \quad (10,6591) \quad (-1,3310) \end{aligned}$$

Nilai intersep (titik potong garis regresi dengan sumbu Y= Belanja Daerah) menjelaskan bahwa pada kondisi PAD, DBH dan DAU sama dengan nol, maka belanja daerah rata-rata kab/kota adalah sebesar -0,0043 atau minus Rp 1.004.309.282,-. Dengan menggunakan model *fixed effect*, yaitu intersep berbeda sedangkan kemiringan garis regresi (*slope*) tetap sama antar kab/kota, maka apabila PAD, DBH dan DAU sama dengan nol, belanja daerah masing-masing kab/ kota adalah ; Kota Bandar Lampung sebesar -0,1422 (= -0,0043-0,1379) atau minus Rp 1.152.807.186,- , Kota Metro sebesar 0,0272 (= -0,0043+0,0315) atau positif Rp 1.027.573.296,- , Kab. Lampung Selatan sebesar -0,1163 (= -0,0043-0,1120) atau minus Rp 1.123.332.821,- Kab. Lampung Tengah sebesar -0,1600 (= -0,0043-0,1557) atau minus sebesar Rp 1.016.128.685,-, Kab. Lampung Timur sebesar 0,0366 (= -0,0043+0,0409) atau positif Rp 1.037.278.026,- Kab. Lampung Utara sebesar -0,0032 (= -0,0043+0,0011) atau minus sebesar Rp 1.003.205.125,-, Kab. Lampung Barat sebesar 0,0477 (= -0,0043+0,0752) atau positif sebesar Rp 1.048.855.951,-, Kab. Tanggamus sebesar - 0,0224 (= -0,0043-0,0181) atau minus sebesar Rp 1.022.652.763,- , Kab. Way Kanan sebesar 0,1504 (= -0,0043+0,1461) atau positif sebesar Rp 1.162.299.069,- dan Kab.Tulang Bawang sebesar 0,1245 (= -0,0043+0,1288) atau positif sebesar Rp 1.132.582.020,- .

Hasil estimasi model di atas menyimpulkan pada kondisi PAD, DBH dan DAU adalah nol, kab/kota yang belanja daerahnya minus mengindikasikan bahwa daerah tersebut tidak memiliki cadangan keuangan yang cukup untuk membiayai belanja daerahnya, apakah dalam bentuk sisa lebih anggaran tahun sebelumnya

(SILPA) atau dalam bentuk lainnya, demikian sebaliknya daerah yang belanja daerahnya positif.

Pengujian Hipotesis

Koefisien Determinasi (R^2)

Hasil analisis data pengaruh PAD, DBH, dan DAU terhadap Belanja Daerah keseluruhan pemda sampel di Provinsi Lampung diperoleh nilai koefisien determinasi atau R^2 sebesar 0,9481, menunjukkan bahwa variabel PAD, DBH, dan DAU memberikan kontribusi sebesar 94,81 persen dalam mempengaruhi Belanja Daerah seluruh kab/kota di Provinsi Lampung. Sedangkan sisanya sebesar 5,19 persen dipengaruhi oleh faktor-faktor lain atau variabel-variabel lain yang tidak diikuti-sertakan dalam studi ini. Secara umum model yang dipergunakan ini dapat dikatakan baik untuk menjelaskan bagaimana pengaruh PAD, DBH, dan DAU, terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung.

Pengujian Secara Simultan (Uji F)

Pada persamaan regresi, hasil analisa data menunjukkan nilai F hitung yang diperoleh sebesar 78,7605 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Jika dibandingkan dengan Alpha 5 %, maka nilai probabilitas yang diperoleh lebih kecil dari Alpha yang ditetapkan ($0,0000 < 0,05$). Dengan demikian H_0 ditolak dan menyimpulkan variabel PAD, DBH, dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) kab/kota di Provinsi Lampung. Dengan kata lain *hipotesis pertama* yang menyatakan PAD, DBH dan DAU berpengaruh positif terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung, *terbukti*.

Pengujian Secara Parsial (Uji t)

Nilai t hitung variabel bebas PAD sebesar 5,2389 dengan probabilitas sebesar 0,0000. berarti probabilitas yang diperoleh lebih kecil daripada Alpha 0,05 ($0,0000 < 0,05$), sehingga H_0 ditolak dan menyimpulkan secara statistik PAD berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah. Tanda positif pada koefisien regresi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara PAD dengan Belanja Daerah. Jika PAD bertambah maka Belanja Daerah juga bertambah, *ceteris paribus*. Sementara itu, nilai t hitung variabel DBH seluruh kab/kota yang diteliti adalah sebesar -1,6281 dengan probabilitas 0,1091. Artinya nilai probabilitas lebih besar dari Alpa 0,05 ($0,1091 > 0,05$), sehingga menerima H_0 dan menyimpulkan bahwa DBH secara statistik tidak berpengaruh terhadap

Belanja Daerah. Tanda negatif pada koefisien regresi menjelaskan bahwa variabel DBH mempunyai hubungan yang negatif terhadap variabel belanja daerah, yaitu jika DBH meningkat mengakibatkan penurunan belanja daerah demikian sebaliknya, *ceteris paribus*.

Variabel bebas DAU memiliki nilai t hitung sebesar 10,6591 dengan probabilitas sebesar 0,0000. Jika hasil ini dibandingkan dengan Alpha (0,05), maka nilai probabilitas yang dihasilkan lebih kecil dari Alpha ($0,0000 < \text{Alpha } 0,05$), sehingga menolak H_0 yang menyatakan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah. Tanda positif pada koefisien regresi menjelaskan bahwa terdapat hubungan yang positif antara DAU dengan Belanja Daerah, jika DAU meningkat maka Belanja Daerah kab/kota juga meningkat, *ceteris paribus*. Nilai t hitung variabel Dummy (D) seluruh kab/kota yang diteliti adalah sebesar -1,3310 dengan probabilitas 0,1886. Artinya nilai probabilitas lebih besar dari Alpa 0,05 ($0,1886 > 0,05$), sehingga menerima H_0 dan menyimpulkan bahwa Dummy (D) secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah. Tanda negatif pada koefisien regresi menjelaskan variabel Dummy (D) mempunyai hubungan yang negatif terhadap belanja daerah, *ceteris paribus*.

Hasil Uji t menyimpulkan bahwa secara parsial, masing-masing variabel bebas PAD dan DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap Belanja Daerah di kab/kota se-Provinsi Lampung, sedangkan variabel bebas DBH dan Dummy (D) tidak berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah.

Pembahasan

Analisis Pengaruh DBH, DAU, dan PAD terhadap Belanja Daerah

Pengaruh PAD terhadap Belanja Daerah

Hasil estimasi antara PAD terhadap belanja daerah di kab/kota Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien regresi PAD sebesar 0,2083 dapat diinterpretasikan bahwa kenaikan PAD sebesar 1 persen akan meningkatkan belanja daerah sebesar 0,2083 persen, *ceteris paribus*. Hasil estimasi ini membuktikan bahwa betapa rendahnya kemampuan daerah dalam menggali sumber-sumber daerahnya sendiri. Bisa dipahami apabila bantuan dan subsidi dari pemerintah pusat lebih mendominasi pembiayaan pembangunan daerah dibandingkan dengan PAD. Kemampuan untuk menyelenggarakan otonomi daerah

berdasarkan desentralisasi fiskal, dapat dikatakan masih kecil. Hasil studi ini mendukung temuan empiris Prakosa (2004), Ashworth *et al* (2005), Maimunah dan Akbar (2008).

Pengaruh Dana Transfer DBH terhadap Belanja Daerah

Hasil estimasi antara DBH terhadap belanja daerah di kab/kota Provinsi Lampung menunjukkan bahwa DBH berpengaruh negatif terhadap belanja daerah. Koefisien regresi DBH sebesar $-0,1124$ menjelaskan bahwa meningkatnya alokasi DBH yang diterima pemda sebesar 1 persen mengakibatkan turunnya belanja daerah pemda sebesar $0,1124$ persen, *ceteris paribus*. Kondisi ini menggambarkan bahwa meningkatnya penerimaan dana transfer kab/kota yang bersumber dari DBH, mengakibatkan kapasitas fiskal daerah meningkat, sehingga celah fiskal menurun yang pada gilirannya alokasi DAU menurun dan menurunkan belanja daerah. Berdasarkan formula perhitungan DAU sesuai UU No. 33 Tahun 2004, kapasitas fiskal daerah merupakan faktor pengurang dalam penghitungan celah fiskal (celah fiskal daerah sama dengan kebutuhan fiskal daerah dikurangi kapasitas fiskal daerah), sehingga meningkatnya alokasi DBH di satu sisi mengakibatkan meningkatnya kapasitas fiskal daerah dan di sisi lain mengakibatkan celah fiskal daerah menurun, yang pada gilirannya alokasi DAU yang diterima daerah pada tahun berikutnya menurun. Penurunan alokasi DAU mengakibatkan menurunnya belanja daerah.

Setelah dilakukan uji signifikansi secara parsial dengan *Uji t*, ternyata secara statistik variabel penjelas DBH tidak signifikan mempengaruhi belanja daerah kab/kota di Provinsi Lampung. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan studi yang dilakukan Irham Iskandar (2012), Maimunah (2006), Darwanto dan Yulia (2007) dan Deller *et al.* (2007). Ketidak sesuaian dengan hasil studi terdahulu disebabkan peneliti tersebut tidak memisahkan komponen dana transfer DAU dan DBH, sedangkan pada penelitian ini dilakukan pemisahan variabel transfer DAU dengan variabel transfer DBH dalam mempengaruhi belanja daerah pemda.

Pengaruh Dana Transfer DAU terhadap Belanja Daerah

Hasil estimasi antara dana transfer DAU terhadap belanja daerah di kab/kota Provinsi Lampung, menunjukkan bahwa DAU berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja daerah. Koefisien regresi DAU sebesar $0,9673$ dapat

diinterpretasikan bahwa kenaikan alokasi DAU yang diterima kabupaten kota sebesar 1 persen mengakibatkan kenaikan belanja daerah sebesar 0,9673 persen, *ceteris paribus*. Hasil estimasi ini menguatkan dugaan bahwa ketergantungan kab/kota di Provinsi Lampung terhadap alokasi DAU dari pemerintah pusat masih sangat tinggi.

Studi ini mendukung temuan empiris Maimunah (2006), Darwanto dan Yulia (2007) dan Deller *et al* (2007). Hal ini disebabkan karena DAU merupakan bentuk transfer yang paling penting selain DAK. Transfer merupakan konsekuensi dari tidak meratanya kemampuan keuangan dan ekonomi daerah. Tujuan pemberian DAU adalah untuk mengurangi kesenjangan keuangan untuk menciptakan stabilisasi aktivitas perekonomian di daerah. DAU merupakan dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan pengeluarannya dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung

Flypaper effect merupakan suatu kondisi dimana stimulus (respons) terhadap pengeluaran daerah yang disebabkan oleh adanya perubahan dalam jumlah transfer DAU dari pemerintah pusat lebih besar dari yang disebabkan oleh perubahan dalam pendapatan daerah. Hal ini tentu bertentangan dengan asas desentralisasi dan prinsip otonomi, di mana pemda dituntut untuk lebih mandiri tanpa bergantung pada pemerintah pusat. Penentuan terjadinya *flypaper effect* dapat dilakukan dengan membandingkan dua koefisien variabel bebas yaitu dana transfer (DAU) dengan PAD, di mana nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan kedua-duanya signifikan, atau PAD tidak signifikan (Khairani, 2008; Maimunah, 2006 serta Sagbas dan Saruc, 2004).

Nilai koefisien regresi antara koefisien DAU sebesar 0,9673 dengan t hitung 10,6591 dan probabilitas 0,0000 maka pada Alpha 0,05 secara statistik DAU berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah, sedangkan nilai koefisien PAD sebesar 0,2083 dengan t hitung 5,2389 dan probabilitas 0,0000 maka pada Alpha 0,05 secara statistik PAD berpengaruh signifikan terhadap belanja daerah. Hasil perbandingan nilai koefisien DAU dan PAD menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Provinsi Lampung, karena koefisien DAU lebih besar daripada PAD dan kedua-duanya signifikan

($b_3=0,9673 > b_1=0,2083$). Dengan demikian *hipotesis kedua* yang menyatakan bahwa telah terjadi *flypaper effect* pada belanja daerah kab/kota di Provinsi Lampung, *terbukti*. Hasil penelitian ini mendukung studi yang telah dilakukan oleh Sagbas dan Saruc (2004), Widarjono (2005), Maimunah (2006), Khairani (2008), Bayu (2011) dan Iskandar (2012). Hasil studi ini juga menemukan fakta bahwa *flypaper effect* hanya terjadi pada dana transfer yang bersumber dari DAU, sedangkan dana transfer dari DBH secara statistik tidak berpengaruh terhadap belanja daerah. Penelitian ini membuktikan pemerintah kab/kota di Provinsi Lampung belum mandiri dari segi keuangan, karena belum mampu bertumpu pada kemampuan keuangan daerahnya sendiri dalam menjalankan roda pemerintahan.

Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten Kota di Provinsi Lampung Berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal

Sebelum dilakukan pengujian hipotesis ketiga dari studi ini, daerah kab/kota yang menjadi sampel penelitian diklasifikasikan ke dalam kategori daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan PAD rendah. Dasar dari pengklasifikasian ini adalah nilai persentase dari derajat otonomi fiskal (DOF) masing-masing daerah. Rasio DOF ini dapat dihitung dengan membandingkan PAD dengan total pendapatan daerah yang bersangkutan. Daerah dengan nilai rasio DOF diatas rata-rata dikategorikan daerah dengan PAD tinggi dan daerah dengan nilai rasio DOF dibawah rata-rata dikategorikan daerah dengan PAD rendah, hal ini ditunjukkan oleh perkembangan rasio kemandirian berdasarkan DOF sebagaimana tabel berikut.

Tabel 4.8. Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Kota se Provinsi Lampung Tahun 2006-2012

No	Kabupaten Kota	Persentase Rasio PAD terhadap Total Pendapatan						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Lampung Barat	3.49	3.55	4.34	4.28	3.91	4.55	4.48
2	Lampung Selatan	3.12	3.57	3.33	4.89	6.62	9.90	9.78
3	Lampung Tengah	2.28	3.1	2.27	3.26	4.09	5.56	8.84
4	Lampung Utara	2.64	5.86	3.21	2.32	2.50	4.46	2.89
5	Lampung Timur	2.81	3.86	3.88	2.87	2.94	3.79	5.03
6	Tanggamus	2.93	2.37	2.65	2.04	2.79	3.16	3.11
7	Tulang Bawang	1.95	3.59	1.75	1.65	6.88	4.27	4.62
8	Way Kanan	2.86	3.57	3.94	3.01	2.33	2.18	1.95
9	Bandar Lampung	8.60	9.13	10.26	10.49	11.96	18.70	25.97
10	Metro	7.40	7.73	7.24	7.54	8.43	11.80	11.30
Rata-rata		3.81	4.63	4.29	4.24	5.25	6.84	7.80

Sumber : Lampiran 4 (data diolah).

Daerah pada tahun tertentu berada di atas rata-rata kab/kota dikelompokkan dalam daerah dengan DOF tinggi diberikan nilai *dummy* = 1, sedangkan daerah pada tahun tertentu di bawah rata-rata kab/kota dikelompokkan ke dalam daerah dengan DOF rendah diberikan nilai *dummy* = 0, sehingga sebaran variabel *dummy* sebagaimana tertera pada Tabel 4.9.

Hasil regresi diperoleh variabel *dummy* dengan nilai t hitung sebesar -1,3310 dan nilai probabilitas 0,1886, berarti nilai probabilitas lebih besar dari Alpa 0,05 ($0,1886 > 0,05$), sehingga H_0 diterima dan menyimpulkan *dummy* daerah dengan DOF tinggi secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah, atau dengan kata lain tidak ada perbedaan yang signifikan antara perilaku pemda yang memiliki PAD tinggi dengan daerah yang PAD-nya rendah dalam mengalokasikan belanja daerahnya.

Tabel 4.9. Sebaran Variabel *Dummy* Berdasarkan Derajat Otonomi Fiskal (DOF) Kabupaten Kota se Provinsi Lampung Tahun 2006-2012

No	Kabupaten Kota	Persentase Rasio PAD terhadap Total Pendapatan						
		2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1	Lampung Barat	0	0	1	1	0	0	0
2	Lampung Selatan	0	0	0	1	1	1	1
3	Lampung Tengah	0	0	0	0	0	0	1
4	Lampung Utara	0	1	0	0	0	0	0
5	Lampung Timur	0	0	0	0	0	0	0
6	Tanggamus	0	0	0	0	0	0	0
7	Tulang Bawang	0	0	0	0	1	0	0
8	Way Kanan	0	0	0	0	0	0	0
9	Bandar Lampung	1	1	1	1	1	1	1
10	Metro	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Data diolah dari tabel 4.8

Berkaitan dengan penelitian ini dapat dimaknai bahwa terjadinya fenomena *flypaper effect* di Provinsi Lampung tidak membedakan antara daerah kab/kota yang memiliki PAD tinggi dengan kab/kota yang memiliki PAD rendah. Secara statistik perilaku keduanya dalam membelajakan belanja daerahnya sama-sama bergantung pada penerimaan DAU dari pemerintah pusat. Dengan demikian *hipotesis ketiga* yang menyatakan bahwa *flypaper effect* terjadi pada belanja pemda kab/kota yang PAD-nya rendah dan tinggi, *terbukti*. Hasil studi ini mendukung penelitian yang telah dilakukan oleh Maimunah (2006), dan Kusumadewi (2007).

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan yang telah diuraikan pada bagian sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Menggunakan regresi data panel *Fixed Effect Model* PAD, DBH, dan DAU secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Belanja Daerah (BD) kab/kota di Provinsi Lampung ; secara parsial PAD dan DAU berpengaruh signifikan dan mempunyai hubungan yang positif terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung, sedangkan variabel DBH secara statistik tidak berpengaruh terhadap Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung.
2. Variabel bebas Jumlah Penduduk (PDK) dihilangkan dari model regresi, karena memiliki hubungan linier (multikolinearitas) yang kuat dengan variabel bebas DAU.
3. Nilai koefisien DAU lebih besar dari nilai koefisien PAD dan keduanya signifikan, hal ini menunjukkan telah terjadi *flypaper effect* pada Belanja Daerah kab/kota di Provinsi Lampung.
4. Fenomena *flypaper effect* di Provinsi Lampung tidak membedakan kab/kota yang memiliki derajat otonomi fiskal (DOF) rendah atau tinggi, karena secara statistik perilaku keduanya dalam membiayai belanja daerahnya sama-sama bergantung pada penerimaan DAU dari pemerintah pusat. Hal ini membuktikan bahwa fenomena *flypaper effect* di Provinsi Lampung tidak membedakan daerah yang memiliki PAD tinggi dengan daerah yang memiliki PAD rendah.

Saran

Berdasarkan kesimpulan yang dihasilkan dalam studi ini, maka disampaikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah kab/kota di Provinsi Lampung, hasil penelitian ini menunjukkan telah terjadinya *flypaper effect* dalam pengelolaan keuangan daerah, dimana pembiayaan dalam APBD lebih bergantung pada penerimaan dana-dana transfer (khususnya DAU), maka untuk mengurangi ketergantungan tersebut pemda disarankan melakukan upaya memaksimalkan potensi daerahnya yang akan berdampak pada meningkatnya pendapatan daerah melalui: (1) intensifikasi dan ekstensifikasi pungutan daerah dalam bentuk retribusi atau pajak daerah dengan tetap mengacu pada UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi daerah, (2) melakukan investasi daerah melalui pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) pada sektor usaha yang prospektif.; dan

- (3) optimalisasi eksplorasi sumber daya alam untuk meningkatkan potensi dana bagi hasil (DBH).
2. Dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah yang nyata, dinamis, bertanggung jawab, maka disarankan kepada pemerintah pusat agar ; (1) menerapkan kebijakan pemberian bantuan yang diarahkan pada kebutuhan daerah setempat, (2) mengurangi tingkat ketergantungan daerah kepada pemerintah pusat melalui kebijakan ; (a) memberikan insentif kepada daerah yang mampu menaikkan dan menjaga konsistensi peningkatan kapasitas fiskalnya, sebagai kompensasi pengganti atas berkurangnya celah fiskal, (b) menambah jenis pajak yang dapat dilimpahkan kewenangan pemungutannya dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah, (c) mempertimbangkan kembali sistem bagi hasil dari penerimaan pajak kepada pemda, (d) mereformasi pajak-pajak daerah dengan meniadakan pajak-pajak daerah yang tidak produktif., sehingga dapat menekan biaya pemungutan dan perhatian dapat difokuskan pada jenis pajak yang lebih produktif.

Daftar Pustaka

- Abdullah, Sukriy dan Halim, Abdul. 2003. "Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Belanja Pemerintah Daerah Studi Kasus Kabupaten/Kota di Jawa dan Bali". *Simposium Nasional Akuntansi VI*, Yogyakarta, Hal 1140-1159.
- Abdul Halim. 2001. *Bunga Rampai: Manajemen Keuangan Daerah*. Edisi Pertama. UPP AMP YKPN. Yogyakarta.
- , 2002. *Seri Akuntansi Sektor Publik-Akuntansi Keuangan Daerah*, Jakarta: Salemba Empat.
- Afrizawati, 2012. "Analisis Flypaper Effect Pada Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan". *Jurnal Ekonomi dan Informasi Akuntansi (Jenius)*. Vol.2 No.1.
- Agus Widarjono, 2005. "The Impact of Intergovernmental Transfers on Local Spending: A Test of the Flypaper Effect", *Simposium Riset Ekonomi II*, Surabaya.
- , 2013, *Ekonometrika Pengantar dan Aplikasinya Disertai Panduan Eviews*, UPP STIM YKPN, Yogyakarta.
- Ahmad Yani. 2002. *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Atiah Handayani. 2009. .Analisis Pengaruh Transfer Pemerintah Pusat Terhadap Pengeluaran Daerah dan Upaya Pajak (*Tax Effort*) Daerah (Studi Kasus: Kabupaten/Kota di Jawa Tengah).. *Skripsi Tidak Dipublikasikan*, Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan, Universitas Diponegoro Semarang.

- Badan Pusat Statistik (BPS). *Lampung Dalam Angka*. Berbagai edisi penerbitan, BPS Provinsi Lampung.
- . *Statistik Indonesia*. Berbagai edisi penerbitan, BPS Provinsi Lampung.
- Diah Ayu Kusumadewi dan Arif Rahman. 2007, "Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umu dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Indonesia", *JAAI Volume 11 No. 1, Juni 2007 : 67-80*.
- Dollery E. Brian and Worthington C. Andrew, 1997. "The Empirical Analysis of Fiscal Illusion", *Journal of Economic Surveys*, pp. 261-297.
- , 1995. "Federal Expenditure and Fiscal Illusion: An Australian Test of The Flypaper Hypothesis. University of New England", *The Journal of Federalism* 25(1). Pp. 23-34.
- Firmansyah. 2006. *Modul Panel Data Regression Aplikasi dengan Eviews 4.0*. Semarang: LSKE
- . 2008. *Modul Praktek Ekonomika Dasar: Estimasi, Asumsi Klasik dan Variabel Dummy Aplikasi Eviews 4.0*. Semarang: LSKE
- Gemmel Norman, Morrissey Oliver, and Pinar Abuzer. 1998; "Taxation, Fiscal Illusion and The Demand for Government Expenditures in The UK: a Time Series Analysis", *School of Economic Discussion Paper, NOW for Financial Support*, B46-363.
- Gideon Tri Budi Susilo dan Priyo Hari Adi. 2007. .Analisis Kinerja Keuangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Sebelum dan Sesudah Otonomi Daerah (Studi Empiris di Propinsi Jawa Tengah). *Paper disajikan pada Konferensi Penelitian Akuntansi dan Keuangan Sektor Publik Pertama*. Surabaya.
- Greene, H. William. 1997. *Econometric Analysis*, Third Edition. New Jersey: Prentice Hall.
- Gujarati, Damodar. 2003. *Basic Econometric*. The McGraw Hill Companies Inc. New York.
- Guritno Mangkoesoebroto,. 1994. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: BPFE.
- Haryo Kuncoro, 2004. "Pengaruh Transfer Antar Pemerintah Pada Kinerja Fiskal Pemerintah Daerah Kota dan Kabupaten di Indonesia", *Jurnal Ekonomi Pembangunan Vol. 9 No. 1, Juni 2004*. Hal : 47-63.
- Hirshleifer, Jack. 1985. *Teori Harga dan Penerapannya*. Terjemahan Kusnedi. Erlangga, Jakarta.
- <http://www.djpk.depkeu.go.id/datadjpk/47/>
- Irham Iskandar. 2012. "Flypaper Effect Pada Unconditional Grant". *Jurnal Ekonomi Pembangunan Volume 12, Nomor 1, Juni 2012*, hal. 113-131.
- Laras Wulan Ndadari dan Priyo Hari Adi. 2008. .Perilaku Asimetris Pemerintah Daerah Terhadap Transfer Pemrintah Pusat.. *The 2nd National Conference UKWMS*. Surabaya.
- Kesit Bambang Prakosa. 2004. .Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi Empirik di Wilayah Provinsi Jawa Tengah dan DIY.. *JAAI, Vol 08 No.2*
- Mudrajad Kuncoro. 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah, Reformasi, Perencanaan, Strategi, dan Peluang*, Erlangga, Jakarta
- . 2012. *Perencanaan Daerah, Bagaimana Membangun Ekonomi Lokal, Kota, dan Kawasan*, Salemba Empat, Jakarta.

- Mutiara Maimunah. 2006. .Flypaper Effect Pada Dana Alokasi Umum (DAU) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Belanja Daerah Pada Kabupaten/Kota di Pulau Sumatera.. *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.*
- Naganathan, dan KJ Sivagnanam. 1999. .Federal Transfer and Tax Effort of States in India.. *Indian Economic Journal.*
- O'brien J Patrick and Shieh Nan Yeung, 1990. " Utility Functions and Fiscal Illusion From Grants", *National Tax Journal Vol. 43, No. 2, pp. 201-05.*
- Priyo Hari Adi. 2006. .Hubungan antara Pertumbuhan Ekonomi Daerah, Belanja Pembangunan dan Pendapatan Asli Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Se Jawa- Bali).. *Paper disajikan pada Simposium Nasional Akuntansi IX Padang.*
- . 2007. .Kemampuan Keuangan Daerah dan Relevansinya dengan Pertumbuhan Ekonomi.. *The 1st National Accounting Conference.* Departemen Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. Jakarta
- . 2009. Fenomena Ilusi Fiskal Dalam Kinerja Anggaran Pemerintah. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan, Vol.6, No.1.*
- Republik Indonesia. (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan.*
- . (2000). *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan*
- . (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah*
- . (1999). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- . (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah.*
- . (2004). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perubahan asat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.*
- . (2000). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- . (2009). *Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.*
- Saragih, Panglima Juli. (2003). *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Sidik, Machfud, B. Raksaka Mahi, Robert Simanjutak, & Bambang Brodjonegoro. (2002). *Dana Alokasi Umum – Konsep, Hambatan, dan Prospek di Era Otonomi Daerah*, Kompas, Jakarta.
- Sumodiningrat, G. 1994. *Pengantar Ekonometrika*. Penerbit BPFE, Yogyakarta.
- Turnbull K. Geoffrey, 1998. "The Overspending and Flypaper Effects of Fiscal Illusion: Theory and Empirical Evidence". *Journal of Urban Economics 44, 1-26.* Department of Economic, Louisiana State University, Baton Rounge.

Imam Santoso, I Wayan Suparta, Saimul

*Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah
Di Provinsi Lampung*

Wirawan Setiaji dan Priyo Hari Adi, 2007, .Peta Kemampuan Keuangan Daerah
Sesudah Otonomi Daerah : Apakah Mengalami Pergeseran? (Studi
Pada Kabupaten dan Kota se Jawa-Bali).. *Paper disajikan pada
Simposium Nasional Akuntansi X*, Universitas Hasanuddin,
Makassar.

Imam Santoso, I Wayan Suparta, Saimul

*Flypaper Effect Pada Pengelolaan Keuangan Daerah
Di Provinsi Lampung*